

Evaluasi dari Kebijakan Pariwisata Geopark dan Strategi untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Belitung

Dino Gustaf Leonandri^{1*}, Dwi Putranto Riau², Teni Listiani³

¹Institut Pariwisata Trisakti

²Universitas Terbuka

³Politeknik STIA LAN Bandung

*dinoleonandri@iptrisakti.ac.id

Informasi Artikel

Received: 12 Februari 2024

Accepted: 10 Maret 2024

Published: 18 Maret 2024

Keywords:

evaluation, tourism policy, competitiveness

Abstract

The management, socialization and development of the Belitung Geopark is very significant. The increase in the number of visitors has a positive impact on revenue and operational costs. Therefore, policies and marketing must be improved. The aim of this research is to analyze the evaluation of Belitung Regency government policies in improving the tourism industry. Evaluating the efficiency of human resource management in the tourism industry in Belitung Regency. Evaluate the effectiveness of collaboration between institutions in improving tourist visit programs in Belitung Regency. Examining the facilities, infrastructure and technology developed to attract investor interest in Belitung Regency. Analyzing resource allocation for the development of the tourism sector to increase the number of tourist visits. Based on the research findings of Leo Agustino (2016) using a policy evaluation model which includes various factors such as Apparatus Resources (SDA), Institutions, Facilities, Infrastructure, Technology, Finance and Supporting Regulations, the researcher concluded that evaluating regulatory implementation policies in Belitung Regency No. 12 of 2015 and Regent Regulation no. 10 of 2019.

Abstrak

Kata Kunci:
evaluasi, kebijakan pariwisata, daya saing

Manajemen, promosi publik, dan perkembangan Geopark Belitung sangat signifikan. Peningkatan jumlah pengunjung berdampak positif pada pendapatan dan biaya operasional. Karena itu, kebijakan dan pemasaran harus ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Belitung untuk meningkatkan industri pariwisata. Mengevaluasi efisiensi manajemen sumber daya manusia di industri pariwisata di Kabupaten Belitung. Mengevaluasi efektivitas kerja sama antar lembaga dalam meningkatkan program kunjungan pariwisata di Kabupaten Belitung. Memeriksa fasilitas, prasarana, dan teknologi yang telah dikembangkan untuk memikat minat investor di Kabupaten Belitung. Menganalisis alokasi sumber daya untuk pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Menurut temuan dari studi oleh Leo Agustino (2016) menggunakan model evaluasi kebijakan, yang mencakup berbagai faktor seperti Aparat Sumber Daya (SDA), Lembaga, Fasilitas, Infrastruktur, Teknologi, Keuangan, dan Regulasi Pendukung, para peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi implementasi peraturan di Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam sumber daya alam dan kekayaan budaya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Sugiyarto & Amaruli, 2018). Berbagai atraksi menarik dan unik di Indonesia menjadikannya pilihan yang diminati oleh wisatawan lokal dan internasional. Indonesia tidak hanya menawarkan wisata alam yang beragam, tetapi juga kekayaan budaya dan sejarah yang memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata (Andina & Aliyah, 2021). Ini karena Indonesia memiliki beragam kelompok budaya yang tersebar di seluruh kepulauan, dari Sabang hingga Merauke (Andina & Aliyah, 2021). Pariwisata berperan sebagai alat untuk mempromosikan persatuan sosial, menjaga keberagaman budaya, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun, di sisi lain, pariwisata juga dapat menimbulkan tantangan dalam banyak aspek masyarakat (Sunarta & Arida, 2017).

Industri pariwisata yang patuh pada berbagai regulasi, termasuk peraturan pemerintah dan regional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan individu, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, memajukan pembangunan budaya, meningkatkan reputasi negara, memperkuat patriotisme, memperkuat identitas dan persatuan nasional, dan mendorong kerjasama internasional. (Mebri et al., 2022). Pariwisata telah memainkan peran penting dalam mengakselerasi transisi ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada industri minyak dan gas ke arah industri yang lebih berkelanjutan. Pergeseran ini terjadi karena kesadaran bahwa sektor minyak dan gas tidak lagi dianggap sebagai masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, negara ini terdorong

untuk mengembangkan bisnis pariwisata melalui kebijakan pemerintah yang mendukung, mengingat keberhasilan beberapa negara lain dalam mengubah sumber daya ekonominya menjadi industri pariwisata (Nugraha, 2018).

Salah satu aspek penting dari kebijakan publik, termasuk kebijakan pariwisata, adalah bahwa produk yang dihasilkan dari kebijakan ini, yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau mereka yang terlibat dalam industri pariwisata, harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan tidak keluar dari misi dan visi kebijakan tersebut (Nugraha, 2018).

Banyak produk kebijakan publik sering kesulitan dalam menerapkan tujuan yang dimaksudkan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, sehingga tidak mencapai hasil yang diinginkan (Tachjan, 2006). Penerapan jangka panjang kebijakan pariwisata telah memunculkan kekhawatiran akan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat tidak sesuainya dengan perkembangan wisata di wilayah tujuan (Citra & Pitana, 2023). Kebijakan pariwisata di tingkat provinsi diatur oleh Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), yang seharusnya mematuhi prinsip-prinsip pembentukan kebijakan publik untuk memastikan konsistensi harmonis antara kebijakan pusat dan implementasinya di wilayah tersebut (Rahafuna, 2023).

Tanjung Kelayang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah diakui sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Teratas. Bangka Belitung juga termasuk dalam yurisdiksi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karakteristik khas pariwisata yang dihasilkan oleh Kepulauan Tanjung Kelayang memunculkan fitur unik yang menarik bagi wisatawan, termasuk garis pantai yang indah dan keberadaan banyak batu granit besar yang tersusun

secara acak. Keunikan ini membedakannya dari pantai lainnya di Indonesia maupun luar negeri, menjadikannya tujuan yang menarik bagi pengunjung.

Setelah kesuksesan film Laskar Pelangi, industri pariwisata di Belitung mengalami pertumbuhan yang besar.

Belitung membutuhkan identitas baru yang bersifat tidak terpengaruh oleh perubahan waktu dan lingkungan. Meskipun begitu, korelasi antara kemajuan pariwisata Belitung dan kesuksesan film Laskar Pelangi tidaklah relevan.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Belitung 2017-2021

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kenaikan/ Penurunan	%
2017	381.262		-
2018	469.590	88.328	23%
2019	347.176	122.414	-26%
2020	136.618	210.558	-61%
2021	186.596	49.978	37%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung (2023)

Kepulauan Belitung dan Bangka terus dipengaruhi oleh industri tambang timah, yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi, kehidupan sosial, dan budaya, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan tingkah laku penduduk di provinsi pulau ini. Pertumbuhan pariwisata di Belitung

menonjol berbeda dengan tempat lain karena dimulai dengan keberhasilan film Laskar Pelangi. Pengumpulan Pajak Hotel mengalami penurunan seiring dengan menurunnya kunjungan wisatawan ke Belitung, seperti terlihat dalam tabel 1 di atas.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Belitung 2017-2021

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel	Kenaikan/ Penurunan	%
2017	8.545.531.734	-	-
2018	11.275.360.884	2.729.829.150	32%
2019	9.251.810.805	2.023.550.079	-18%
2020	3.877.537.006	5.374.273.800	-58%
2021	4.261.525.785	383.988.779	10%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung (2023)

Pariwisata telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara, terutama dengan meningkatnya penggunaan mata uang Indonesia. Namun, sejumlah faktor internal dan eksternal memengaruhi jumlah mata uang asing yang diterima oleh Indonesia. Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat memberikan banyak manfaat bagi negara (Soebagyo, 2012).

Dalam konteks pariwisata masa depan, pentingnya kearifan lokal dan warisan budaya menjadi kunci. Dalam mengembangkan pariwisata yang lebih estetis dan etis, penting untuk menjaga pola pembangunan yang didasarkan pada budaya dan pengetahuan lokal. Hal ini memerlukan sumber daya manusia dengan keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi serta mengelola aset

pariwisata secara efektif. Dalam hal ini, pembangunan pariwisata harus membuat pendatang merasa aman dengan kehadiran orang-orang lokal yang memperkaya tempat tersebut dengan identitas budaya dan kesan uniknya. Rahma (2020) dalam "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia" juga menyampaikan bahwa sumber daya alam merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Pembaharuan dalam penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung. Salah satu fokus utamanya adalah evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah, serta strategi yang menggabungkan Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan penghargaan Unesco-Geopark, Pengelolaan kelembagaan kepariwisataan, industri pariwisata, serta peningkatan kekuatan gambaran regional (*rebranding*).

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyimpangan dan ketidaksesuaian terhadap kebijakan pariwisata, sekaligus mengidentifikasi peluang dari strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung. Tujuan lainnya adalah menetapkan evaluasi dan prioritas kebijakan untuk mengembangkan strategi pariwisata di Belitung. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini menggunakan data utama dari penelitian lapangan untuk analisis kualitatif dan data sekunder untuk analisis deskriptif.

TINJAUAN PUSTAKA

Destinasi Super Prioritas adalah bagian dari program yang dikenal sebagai "10 Bali Baru," yang disetujui oleh Pemerintah. Program tersebut dirancang untuk menarik perhatian

wisatawan dan mempromosikan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan melibatkan masyarakat setempat (CNN Indonesia, 2018).

Adapun 10 Destinasi Prioritas 10 Bali Baru (CNN Indonesia, 2018) adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang (Belitung), Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Tengger, Wakatobi, Labuan Bajo, Pulau Morotai.

Pemasaran pariwisata cenderung fokus pada identifikasi segmen pasar tertentu dan memahami cara mereka berperilaku (Damanik, 2006). Perhatian utama adalah untuk memperjelas kepada pasar bahwa produk (yang ditargetkan) memiliki keunggulan dan karakteristik yang membedakannya dari produk sejenis. Saluran iklan tradisional mungkin tidak selalu sesuai untuk mempromosikan produk pariwisata, terutama yang menargetkan segmen pasar yang khusus (Damanik, 2006).

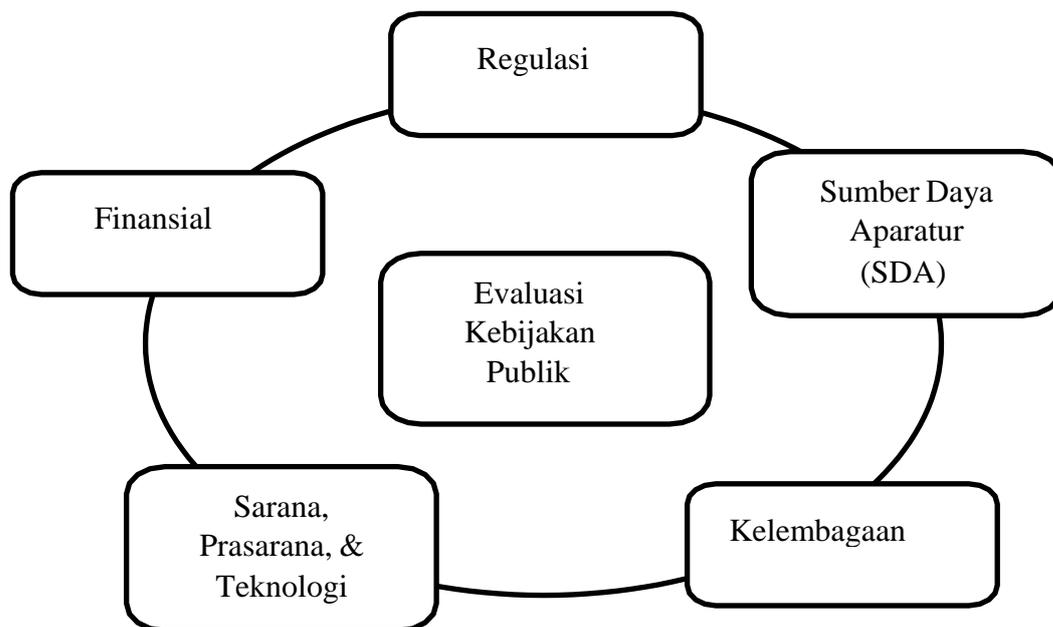
Holloway & Robinson (1995) mendefinisikan Pemasaran pariwisata melibatkan tujuh elemen penting, yakni produk, posisi, harga, promosi, tempat, kemasan, dan kemitraan. Ini mencakup berbagai kegiatan strategis dan terkoordinasi yang dilakukan oleh perusahaan atau kelompok industri wisata, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan kepuasan wisatawan sambil juga menghasilkan keuntungan yang wajar.

Secara umum, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menangani masalah sosial. Akan tetapi, ada pandangan bahwa masalah sosial dapat diselesaikan oleh staf kebijakan yang ada dan tidak memerlukan perhatian khusus, sehingga kebijakan publik bisa dikembangkan berdasarkan gagasan tersebut (Kristian, 2023).

Penilaian dan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik bisa didasarkan pada konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dinamisme, efisiensi, dan efektivitas: (1) Menurut Achmad (2016), kebijakan dapat dianggap berhasil ketika dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku; (2) Coryanata (2012) menyatakan bahwa informasi mengenai pelaksanaan kebijakan publik harus mudah diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkannya; (3) Implementasi kebijakan publik memerlukan tanggung jawab administratif dan material yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diungkapkan oleh Akib (2010); (4) Menurut Ramdhani & Ramdhani (2017),

kebenaran terutama merujuk pada jenis kebenaran, kebaikan, dan kebajikan yang memungkinkan orang-orang dalam suatu komunitas untuk mencapai keselarasan antara pelaksanaan hak-hak dan kewajiban; (5) Coryanata (2012) menekankan bahwa keterlibatan publik dalam pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari penjelasan di atas, implementasi kebijakan harus melibatkan partisipasi, yang berarti bahwa pelaksanaan kebijakan dapat mengubah cara masyarakat mendekati pemenuhan kebutuhan, mencapai tujuan, mengadopsi pendekatan tertentu, dan memenuhi harapan (Yunus & Rezki, 2020).



Gambar 1. Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino
Sumber: Agustino (2017)

Penilaian menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan akurat tentang kebijakan. Untuk memperkuat industri pariwisata di Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menyusun Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Belitung untuk periode 2009-2019. Namun, reformasi terhadap RIPPDA Kabupaten Belitung diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Pariwisata No. 10 tahun 2009 dan

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 mengenai Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025.

Pembangunan berkelanjutan merupakan tindakan terpadu dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang berkesinambungan, baik dalam pengadaan, pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan sumber daya (Arida & Arismayanti, 2015). Daya saing adalah hasil dari kombinasi kelembagaan, kebijakan, dan berbagai faktor lain yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara (Sirait & Panjaitan, 2016). *Competitiveness* monitor menggunakan lima indikator untuk mengukur industri pariwisata, yaitu memfasilitasi kondisi lingkungan, kebijakan perjalanan dan pariwisata, kondisi infrastruktur, penggerak permintaan perjalanan dan pariwisata, serta keberlanjutan pariwisata. (Agustian, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian dan evaluasi substansi, implementasi, dan dampak kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan (Winarno, 2008). Studi ini menggunakan model utama kebijakan Anderson, khususnya evaluasi kebijakan, yang diartikan sebagai kegiatan fungsional. (Winarno, 2008).

Menurut Zed (2008), studi literatur mengacu pada serangkaian langkah atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang bisa melibatkan sumber-sumber seperti perpustakaan, bahan bacaan, atau sumber daya lainnya, yang membantu dalam organisasi dan manajemen materi penelitian di masa mendatang.

Pengumpulan literatur adalah proses sistematis mengumpulkan data teknis melalui analisis buku, catatan, laporan, dan sumber-sumber sastra lainnya. Ini melibatkan eksplorasi

hubungan antara isu-isu yang diteliti oleh peneliti (Nazir, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 8 dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata mencakup Rencana Pusat membangun Pariwisata Daerah. Di samping itu, Pasal 9 secara jelas menyatakan bahwa rencana master pembangunan pariwisata, yang disebutkan dalam ayat (4), mencakup perencanaan strategis dari berbagai aspek seperti pertumbuhan sektor pariwisata, pengembangan destinasi wisata, strategi pemasaran, dan pembentukan lembaga wisata (Prakoso, 2016). Penelitian ini menitikberatkan pada RIPPARDA, sebuah dokumen yang menguraikan rencana strategis untuk pertumbuhan pariwisata di provinsi selama 15 tahun.

Tujuan, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Belitung terkandung dalam dokumen RPD Belitung 2024-2026, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah terkait pariwisata, serta untuk mencapai realisasi dari tujuan tersebut.

Mengembangkan ekonomi dan keadilan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui strategi meningkatkan kompetitivitas pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta orientasi kebijakan yang mencakup: (1) Peningkatan manajemen dan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran wisata, industri pariwisata, dan lembaga pariwisata; (2) Memperbaiki kompetensi sumber daya manusia dalam sektor pariwisata dan sumber daya ekonomi kreatif; (3) Memperluas ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata.

Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan model Agustino (2017) dalam penelitian mereka, yang memfokuskan pada penilaian efektivitas

Peraturan Daerah Kabupaten No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Belitung No. 10 Tahun 2019 dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti sumber daya aparatur (SDA), kelembagaan, sarana dan prasarana, teknologi, keuangan, dan regulasi (pendukung).

Peneliti menerapkan metodologi deskriptif kualitatif dalam penelitian mereka yang berjudul "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Belitung No. 10 Tahun 2019 dalam Promosi Pariwisata di Daerah Belitung". Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Creswell (2016: 260-268).

Model ini melibatkan beberapa langkah penting selama proses pengumpulan data, termasuk pengolahan dan persiapan data untuk analisis, pemeriksaan menyeluruh dari seluruh dataset, inisiasi pengkodean data, penerapan prosedur pengkodean untuk menggambarkan konteks (keluarga), individu (peserta), kategori, dan tema yang akan dianalisis, demonstrasi bagaimana deskripsi dan topik ini akan disajikan dalam narasi atau laporan kualitatif, dan langkah akhir dari interpretasi atau mengkode data.

Dalam penelitian yang mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belitung, peneliti memilih informan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam sektor pariwisata Geopark, komunitas lokal yang tinggal di area sekitar Geopark Belitung, dan pemangku kepentingan yang mempunyai pengetahuan tentang informasi pariwisata Geopark.

Berdasarkan penelitian yang menggunakan teori evaluasi kebijakan

yang diusulkan oleh Agustino (2017), yang mencakup sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasarana, dan teknologi, finansial, dan regulasi (pendukung), peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2019 belum berjalan dengan optimal. Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2019 mengatur prosedur kerja, tata tertib, dan prosedur penerapan dan peningkatan kesadaran dalam promosi pariwisata di Kabupaten Belitung, sementara Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan prosedur untuk menginformasikan, mendidik, dan mengedukasi penentu kebijakan di Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Belitung. Tidak optimalnya pelaksanaan peraturan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya persiapan peralatan dan sumber daya manusia, sumber daya yang kurang memadai, dan keterbatasan atraksi wisata di Kawasan Geopark.

Peralatan dan sumber daya manusia di Geopark Belitung tidak disiapkan dengan cukup baik untuk mengelola daya tarik wisata secara efektif. Pengamatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas atraksi pariwisata Geopark Belitung belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sumber daya yang tidak mencukupi, fasilitas, dan teknologi dalam menciptakan daya tarik wisata memerlukan penyediaan peralatan, fasilitas, dan teknologi yang tepat. Atraksi wisata di Geopark Belitung mengalami kekurangan bahan, persediaan, dan teknologi yang cukup karena keterbatasan dana. Banyak wisatawan dan penjual telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kapasitas terbatas atraksi dan kekurangan

keamanan. Selain itu, pemeliharaan fasilitas wisata seperti gazebo, permainan, dan mushola juga kurang memadai, dengan sampah yang tersebar dan kurangnya lampu PJU dan telekomunikasi. Pemerintah, dalam peran mereka sebagai pembuat kebijakan, sangat perlu untuk secara aktif meningkatkan sarana, sumber daya, dan teknologi yang mendukung ekosistem ini melalui implementasi peraturan baru.

Atraksi wisata di Geopark yang disertakan dalam program pengembangan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan pengeluaran regional (APBD). Peraturan yang mengatur hal ini termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Belitung untuk periode 2011-2031, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung. Peraturan Bupati Belitung juga mencakup Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pembangunan Pariwisata Terpadu Daerah Belitung dari 2015 hingga 2025. Rencana ini diuraikan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 dan menetapkan tujuan dan sasaran dari rencana aksi regional tersebut. Pembangunan pariwisata yang terintegrasi berfungsi sebagai kerangka strategis bagi pemerintah Daerah Belitung untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Tujuan dari keterangan di atas adalah meningkatkan manajemen institusi pembangunan ekonomi di wilayah ini, meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja lokal, mendorong lingkungan bisnis yang kondusif, serta mempromosikan partisipasi aktif baik dari perusahaan swasta maupun masyarakat. Selain itu, keterangan tersebut menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan pembangunan, baik di

tingkat regional maupun pusat. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah memfasilitasi dan merangsang pertumbuhan di sektor pariwisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sasaran dan tujuan dari Rencana Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Belitung 2015-2025, sebagaimana diuraikan dalam Aplikasi Daerah Kabupaten Belitung 2015 Nomor 12 dan Aplikasi Tambahan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19, adalah untuk menjadikan Kabupaten Belitung sebagai destinasi geowisata moral, berkelanjutan, dan kompetitif yang berskala global, namun belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2015 di kawasan wisata Geopark, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, masalah-masalah ini harus dijadikan bahan studi dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam merevisi Peraturan Daerah.

Saran

Pemerintah Kabupaten Belitung harus memperhatikan lebih serius masalah yang terkait dengan persiapan sumber daya manusia dan peralatan dalam mengelola daya tarik wisata, khususnya di kawasan Geopark Belitung. Langkah ini harus diambil untuk memastikan bahwa wisatawan merasa aman dan puas selama kunjungan mereka.

Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas, persediaan, dan teknologi di atraksi wisata Geopark Belitung. Ini termasuk peningkatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas wisata yang sudah

ada, serta investasi dalam peningkatan infrastruktur.

Peraturan baru yang mendorong penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan atraksi wisata harus diusulkan dan diberlakukan. Ini dapat membantu mengatasi beberapa tantangan, seperti peningkatan keamanan dan efisiensi operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. Y. N. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1), 16–25.
- Agustian, F. W. (2022). Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Pada Kabupaten Lumajang dan Peningkatan Ekonomi Daerah. *JIE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(4), 653-664.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Andina, S. A., & Aliyah, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur. *Cakra Wisata: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 22(1), 27-38.
- Arida, I. N. S., & Arismayanti, N. K. (2015). *Paradigma dan Kebijakan Pariwisata*. Denpasar: Penerbit Cakra Press.
- Citra, I. P. A., & Pitana, I. G. (2023). Alternative Tourism: Implementasi dan Dampak Negatif Potensial Pariwisata Pesisir di Desa Temukus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 412-418.
- CNN Indonesia. (2018). Indonesia Pamer '10 Bali Baru' di Pertemuan IMF-Bank Dunia. Diakses Pada 25 Agustus 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com>.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110–125.
- Damanik J. (2006). Kebijakan Publik dan Praksis Democratic Governance di Sektor Pariwisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 331–350.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung (2023). Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Bangka Belitung. Diakses Pada 25 Agustus 2023, dari <https://belitungkab.bps.go.id>
- Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung (2023). Jumlah Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Belitung. Diakses Pada 25 Agustus 2023, dari <https://data.belitung.go.id/>
- Holloway, J. C., & Robinson, C. (1995). *Marketing for Tourism*. London: Longman Group Limited.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 88-98.
- Mebri, F. H., Suradinata, E., & Kusworo. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 102-114.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugraha, Y. M. (2018). Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing di Kepulauan Riau.

- Penelitian dan Karya Ilmiah*, 3(2), 63-68.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
- Peraturan Bupati Belitung No 10 tahun 2019 Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Belitung.
- Peraturan Pemerintah tahun 2011 No. 50 Tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025.
- Prakoso, A. A., (2016). Dampak Multiganda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) terhadap Kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kepariwisataan*, 10(1), 1-26.
- Rahafuna, M. Z. (2023). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Ripparda Destinasi Super Prioritas: Perspektif Keberlanjutan dan Daya Saing. *Pringgitan*, 4(2), 121-134.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *JNP: Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sirait, R. A., & Panjaitan, J. Y., (2016). Pengaruh Daya Regional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia: Analisis Data Panel. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 1(1), 2-19.
- Soebagyo, (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Liquidity*, 1(2), 153-158.
- Sugiyarto., & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis* 7(1), 45-46.
- Sunarta, N., & Arida, N. S. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Penerbit Cakra Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truenorth Bandung.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(3), 227.238.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia